

MAKALAH



Pelayanan Publik Kepolisian yang Diharapkan Masyarakat dan Konstitusi

*Oleh:
Nur Ismanto*

PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN YANG DIHARAPKAN MASYARAKAT DAN KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR & WORKSHOP
HASIL RISET “PERLINDUNGAN POLISI TERHADAP KAUM MINORITAS
DAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH POLDA DIY”
DISELENGGARAKAN PUSHAM UII

OLEH: NUR ISMANTO

DI HOTEL SANTIKA PREMIERE YOGYAKARTA, 23-24 JULI 2013.

SISTEM KETATANEGARAAN

DALAM SUATU NEGARA TERDAPAT UNSUR :

- PEMERINTAH YANG BERDAULAT
- RAKYAT
- TERITORIAL-WILAYAH-DAERAH (PEMBENTUK)
- PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN (DEKLARATIF)

Oppenheim-Lauterpach

UNSUR NEGARA RI

EKSEKUTIF
Kepolisian

LEGIS
LATIF

R

A

K

Y

A

T



MAKNA UNSUR DIATAS ADALAH

- ◉ PEMERINTAHAN ATAU KEKUASAAN YANG MANDIRI JAUH DARI "INTERVENSI" KEKUATAN ATAU KEPENTINGAN ASING, PEMODAL, KELUARGA & KEKUASAAN POLITIK-MILITER DST.
- ◉ APARATUR NEGARA YANG ADA,
 - LEGISLATIF,
 - EKSEKUTIF (SEPERTI PENEGAK HUKUM-KEPOLISIAN) &
 - YUDIKATIF BENAR-BENAR TIDAK TERGANTUNG – "BERHARAP" DARI KEKUATAN ATAU DARI SUATU "POTENSI" YANG BISA DIHARAPKAN.

DEFISIT ATAS KEMANDIRIAN APARATUR NEGARA (KEPOLISIAN)

- ① “HILANGNYA “ ATAU DITENGARAI MASUKNYA INTERVENSI YANG ADA MAKA HANCURLAH KEDAULATAN PEMERINTAHAN DAN DALAM JANGKA PENDEK RAKYAT YANG JADI KORBAN SERTA JANGKA PANJANG NEGARA YANG AKAN TERGADAIKAN, “HANCUR-NYA KEDAULATAN” DALAM KENDALI NEGARA LAIN - MEUSAK DIRI.
- ② KEMANDIRIAN ATAU KEDAULATAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS
- ③ TERJADINYA PEMBATASAN WEWENANG SERTA PEMENUHAN KEHENDAK RAKYAT

KEDUDUKAN RAKYAT

- ◉ MENJAGA KEMANDIRIAN APARATUS NEGARA YANG ADA (KEPOLISIAN-ALAT NEGARA) SEBAGAI PENJAGA-PEMELIHARA SERTA PENYELESAI MASALAHN YANG DIDORONG ATAS RASA PARTISIPATIF NIR KORUPTIF & NIR KEKERASAN (*NON VIOLENT*).
- ◉ MEMPEROLEH JAMINAN PERLINDUNGAN MELALUI *PROMOTIF*-PENTINGNYA RASA AMAN, *PREVENTIF*-PENCEGAHAN ATAS GANGGUAN KENYANYAMANAN, *REPRESIF*-PENEGAKAN HUKUM BILA TERJADI PELANGGARAN, *CURATIF*-PEMULIHAN RASA AMAN ATAU *REHABILITASI*-MENGEMBALIKAN RASA AMAN.

MAKNA KEWAJIBAN & TANGGUNGJAWAB NEGARA

- ◉ NEGARA MELALUI PEMERINTAHAN YANG ADA PUNYA KEWAJIBAN DIANTARANYA MELINDUNGI RASA AMAN SERTA PELAYANAN AKAN KEBUTUHAN RAKYAT.
- ◉ TANGGUNGJAWAB TERSEBUT MERUPAKAN NILAI DARI SEBUAH “JIWA PENGABDIAN” YANG TELAH MENJADI PILIHAN PROFESI.
- ◉ TERHINDAR DARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU MEMBERIKAN PELUANG PEMBIARAN PERILAKU “MENYIMPANG” ATAU JUSTRU “DILEMBAGAKAN” OLEH OKNUM KEKUASAAN YANG *A-NASIONALISTIK* ATAU *A-UNIVERSALITAS* ATAS KEKUASAAN YANG BERMARTABAT DAN BERKEADILAN.

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAHAN

- MEWUJUDKAN RASA TENTRAM DAN NYAMAN TERHADAP RAKYAT OLEH KEKUASAAN EKSEKUTIF CQ KEPOLISIAN RI (DALAM NEGERI) & TNI (GANGGUAN LUAR NEGERI).
- MENGELOLA POTENSI SUMBERDAYA ALAM DALAM WILAYAH YANG ADA (DARAT, LAUT, UDARA) DAN MELALUI WAJIB PAJAK RAKYAT YANG PROPORSIONAL SERTA PROFESIONAL GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN NEGARA DALAM SEMUA SEKTOR (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBANGUNAN, PENEGAKAN HUKUMMAUPUN KESEJAHTERAAN LAINNYA-MILITER DAN IPTEK).
- MENYELARASKAN ANTARA KEBUTUHAN & PENGEMBANGAN PENYELENGGARA NEGARA DENGAN POTENSI KEDUA SUMBER UNTUK MENGHINDARI “PEMENUHAN” DILUAR SEKTOR FORMAL PEMBIAYAAN KEBUTUHAN NEGARA (NORMAL)

PROBLEMATIK PELAYANAN POLISI TERHADAP MASYARAKAT

- ◎ BANYAKNYA OKNUM YANG KURANG MENYADARI SELAKU APARATUS NEGARA YANG TERPILIH DIANTARA WARGA NEGARA ATAU MASYARAKAT YANG ADA
- ◎ RENDAHNYA ATAS DEDIKASI & INTEGRITAS APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT
- ◎ LOYALITAS YANG CENDERUNG MENYIMPANG

JIWA APARAT KEPOLISIAN YANG DEFISIT

DEDIKASI
(PENGABDIAN)

PRAGMATISME
(KEPENTINGAN SESAAT)

LOYALITAS
("TAAT" ILEGAL-PEMBIARAN)

INTEGRITAS
(KEJUJURAN)

PROBLEM TEKNIS LAIN ?

- ① PROFESIONALITAS POLRI
- ① SARANA & PRASARANA YANG “JADI KAMBING HITAM”
- ① PERSONIL YANG “TERBATAS”

FAKTA LAYANAN DILINGKUNGAN POLDA DIY

- ⦿ KASUS PEMBUNUHAN WARTAWAN UDIN YANG BELUM JELAS
- ⦿ TERBUNUHNYA PELAJAR “REZA”
- ⦿ PENGANIAYAAN DI LKIS
- ⦿ TINDAKAN *EIGENRICHTING* YANG TERJADI (PEMAGARAN SMA SWASTA, KEPEMILIKAN WARGA YANG DALAM SENGKETA)
- ⦿ KORBAN “PENCULIKAN” Ny. SUMINI

“PENYALAHGUNAAN WEWENANG” YANG DIPERTANYAKAN

- ⦿ PENGAMBILALIHAN PENANGANAN KASUS DIPOLRES DITARIK KE POLDA
- ⦿ UJUNG-UJUNGNYA DI “BEKUKAN”
- ⦿ “DUKUNGAN” ATASAN INSTITUSI YANG TERKESAN MELINDUNGI JIWA -“KORSA”
- ⦿ LEMAHNYA PERAN INSTITUSI ATASAN ATAU PENGAWAS INTERNAL (IRWASUM-PROPAM-KOMPOLNAS)

TRANSPARANSI SETENGAH HATI

- SUMBANGAN MASYARAKAT YANG TANPA PERTANGGUNGJAWABAN (SUMBANGAN ADMIN)
- SLOGAN YANG CENDERUNG PROFORMA DAN HIPOKRESI (TANPA BIAYA, KORUPSI, KEKERASAN)
- PERATURAN YANG TIDAK TERTANAM DALAM JIWA SEBAGAI PEDOMAN DALAM BEKERJA (PERKAP, UU DAN KODE ETIK)

LAPORAN PEMBIAYAAN YANG ADA (SUBSTANSIAL & NON SUBSTANSIAL)

- BERAPA BIAYA PENYIDIKAN DALAM TIAP KASUS (BIASA & KHUSUS)
- LAYANAN PUBLIK (ADMIN)
- OPERASIONAL PATROLI
- MODUS DAN PENGGALIAN DANA YANG “DIBENARKAN” UNTUK KEGIATAS SOSIAL (JIKA DIMUNGKINKAN)
- PENGEMBANGAN FISIK FASUM (MASJID-MUSHOLLA, OLAH RAGA DST.)

LAYANAN PUBLIK (PENGADUAN-KELUHAN) YANG KURANG EFEKTIF

- KOTAK SURAT
- SMS
- WEB
- TELEPHON

DARI FASILITAS YANG ADA TERSEBUT JARANG DIMANFAATKAN KARENA ADA KEKHAWATIRAN TIDAK DIPERHATIKAN ATAU TIDAK TERLINDUNGI INPUT-KOREKTIF YANG DILAKUKAN.

KESIMPULAN

- ◉ DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PERLU JIWA NASIONALIS ATAS TANGGUNGJAWAB SELAKU SALAH SATU UNSUR NEGARA SEBAGAI APARATUS PEMERINTAH
- ◉ KENDALA FINANSIAL HARUS DISELESAIKAN SECARA KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
- ◉ KETEGASAN DAN KEJELASAN ATAS PERAN SERTA TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN MAUPUN MASYARAKAT DILAIN PIHAK.
- ◉ TERIMAKASIH.